



Newsletter Pusdatin

ISSN : 1411-9196

Pusat Data dan Informasi Pertanian

Daftar Isi :

- Laporan Sidang 42nd *Assembly of Nation IRSG World Rubber Summit* Kuala Lumpur 24-28 April 2006..... (1)
- Workshop Pengembangan Kapasitas Pengelola Pusat Informasi Pertanian, Program Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi (P4MI) di Hotel Bumi Wiyata Depok 17-19 April 2006.....(4)
- Rencana Survei Stok dan Konsumsi Tahun 2006.....(7)
- Audit Teknologi Informasi Pertanian Departemen Pertanian(8)
- Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan Tingkat Nasional 2006.....(10)
- Kunjungan Petugas Pengelola Data dan Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Papua di Pusdatin, 2006.....(11)

Tim Redaksi :

Penasehat : Dr. Edi Abdurachman, MS
Penanggung Jawab :

Ir. Harisno, MM
Ir. Tassim Billah, MSc
Ir. Yasid Taufik, MM
Ir. Retno Indah WBH, MM

Redaksi : Ir. Dewa N Cakrabawa, MM
Dra. Laelatul Hasanah, MSi
Ir. Tita Widyawati, MM

Editor : Ir. Rumonang Gultom
Dra. Hanny P. Mulyani, MM
Ir. Takariyana Heni, MM
Ir. Roch Widaningsih, MSi
Ir. Mohammad Chafid, MSi

Kontak Redaksi : Siti Dhorifahati, SE
Sri Wahyuningsih, Heruwati, Asiah,
Widiyanti, Dian P

Desain Layout : Moh. Ade Supriyatna

Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk Newsletter Pusdatin

Kirimkan ke alamat redaksi :

Pusat Data dan Informasi Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Gd. D Lantai IV
Pasar Minggu – Jakarta 12550
Telp : 021-7805305, 7816384
Fax : 021-7822638
e-mail : newsletter@deptan.go.id

Laporan Sidang 42nd *Assembly of Nation IRSG World Rubber Summit* Kuala Lumpur 24-28 April 2006

**I. Umum :**

International Rubber Study Group (IRSG) merupakan forum kerjasama komoditi karet yang anggotanya adalah negara-negara produsen/eksportir dan konsumen/importer karet dunia. Sidang ke-42 *Assembly of Nation of IRSG* diadakan di Kuala Lumpur pada tanggal 26-27 April 2006 dan Pemerintah Malaysia menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang dimaksud. Sebelumnya, yaitu pada tanggal 24-25 April 2006 telah diselenggarakan *World Rubber Summit*. Kedua pertemuan tersebut di hadiri oleh kurang lebih 120 orang peserta yang merupakan delegasi pemerintah anggota IRSG (Belgia, Cameroon, Pantai Gading, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Malaysia, Russia, Singapore, Spanyol, Srilanka, Thailand, Inggris dan Amerika Serikat) dan kalangan swasta (eksportir dan industri karet dan produk-produk karet) serta negara-negara non member seperti Vietnam dan Cina. Delegasi Indonesia terdiri dari wakil-wakil Deptan (Ditjenbun, Ditjen PPHP, Setjen), Depdag, Depperin, Kantor Menko Perekonomian dan GAPKINDO.

Pada tanggal 24 April 2006 kedua pertemuan dibuka sekaligus secara resmi oleh Datuk Peter Chin Fah Kui,

Minister of Plantation Industries and Commodities. Dalam sambutannya, Datuk Peter Chin menyampaikan bahwa Sekretariat IRSG perlu mengevaluasi efektivitas peran dan manfaatnya bagi masing-masing negara anggota. Ada kesan saat ini India ingin menjadi anggota dan Inggris justru sedang mempertimbangkan untuk keluar sebagai anggota IRSG.

Sebagai forum *study group*, IRSG berfungsi antara lain memproyeksikan perkembangan industri karet dunia. Berdasarkan hasil studi IRSG dalam jangka panjang akan terjadi kekurangan *supply* karet alam dunia karena kurangnya produksi dibandingkan permintaannya. Adalah menjadi tanggung jawab negara-negara anggota untuk menyediakan data secara akurat karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap hasil studi IRSG. Hal ini penting diperhatikan karena apabila rekomendasi IRSG dimanfaatkan oleh negara produsen anggota IRSG dalam menentukan kebijakan pengembangan industri karet, maka hal tersebut akan mempengaruhi nasib jutaan petani karet pada negara-negara produsen anggota IRSG.

Lebih lanjut, Datuk Peter Chin menyampaikan, bahwa Pemerintah Malaysia baru saja menerapkan dana pembangunan untuk industri karet bersumber dari penerimaan karet dan produk-produk karet (*cess*), karena untuk Malaysia karet merupakan '*strategic crop*' ke-2 setelah kelapa sawit. Dana yang terhimpun dari penerimaan karet dan produk-produk karet terutama digunakan sebagai kredit lunak peremajaan tanaman dan untuk penelitian dan pengembangan karet.

Pertemuan World Rubber Summit, 24-25 April 2006.

World Rubber Summit merupakan lokakarya yang membahas secara luas perkembangan produksi dan konsumsi karet alam dan karet sintetik, dan perkembangan produksi dan konsumsi produk-produk karet (ban mobil, sarung tangan, benang karet, foam, dll). Adapun pokok – pokok hasil lokakarya adalah sbb :

(1) Prospek Perdagangan Karet Dunia :

Sebelum acara lokakarya dimulai, Dr Hidde Smit, Sekjen IRSG menyampaikan ulasan singkat tentang kondisi dan prospek pengembangan industri karet. Berdasarkan hasil kajian IRSG, permintaan atau konsumsi karet dunia meningkat tajam menjadi 20 juta ton pada tahun 2005; diproyeksikan 24 juta ton pada tahun 2010 dan menjadi 30 juta ton pada tahun 2020. Disisi lain, sebagai akibat meningkatnya permintaan/konsumsi, dan meningkatnya harga Karet Synthetis (KS) karena kenaikan harga minyak bumi, maka telah terjadi

peningkatan harga karet alam secara tajam. Harga karet alam yang pernah terpuruk mencapai US \$ 0,46/kg pada tahun 2001, harganya mulai membaik pada tahun 2002 (berkisar US \$ 0,70/kg) meningkat lagi menjadi berkisar US\$ 1,20/kg pada tahun 2005 dan meningkat kembali hingga mencapai kisaran US \$ 2/kg (*Standar Malaysian Rubber*).

Lebih lanjut disampaikan bahwa hasil kajian IRSG menunjukkan terjadi *trend* peningkatan yang tajam dalam *share* karet alam terhadap total permintaan karet dunia dari tahun 2003 hingga 2005 (42,5 %), dibandingkan *sharenya* dari tahun 2001 hingga 2003 yang relative tetap pada kisaran 41 % dari total permintaan karet dunia. Total konsumsi karet alam pada tahun 2005 berkisar 8,2 juta ton dan diperkirakan meningkat jadi 9-9,5 juta ton pada tahun 2010 serta diproyeksikan mencapai 12 juta ton pada tahun 2020. Faktor utama peningkatan permintaan terhadap karet alam adalah peningkatan industri produk-produk berbahan baku karet (ban mobil, sarung tangan, foam, benang karet, dll), khususnya di negara-negara *new emerging economies* seperti China dan Korea. Disisi produksi, tahun 2020 total produksi karet alam dunia diperkirakan berkisar 9-9,5 juta ton atau akan terjadi kekurangan suplai berkisar 2,5-3 juta ton. Oleh karena itu Sekjen IRSG mengharapkan agar melalui forum IRSG dapat diciptakan transparansi informasi agar tercipta jaminan keberlanjutan industri karet dan produk-produk karet dunia.

Kondisi atau perkembangan harga karet alam yang terus meningkat, perkembangan industri barang-barang karet yang juga meningkat yang berdasarkan proyeksi tidak diimbangi dengan peningkatan *supply* karet alam telah menjadikan kekhawatiran industri-industri produk karet di negara maju akan terjadi *shortage of supply* dalam jangka panjang. Inilah sebabnya negara konsumen mengusulkan *Rubber Eco Project* sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan produksi karet alam dalam rangka menyeimbangkan *supply* dan *demand* dunia.

(2) The Rubber Eco Project

Gagasan *Rubber Eco Project (REP)* muncul pada tahun 2003 pada pertemuan forum *Industry Advisory Panel (IAP) - IRSG* yang diinisiasi kalangan industri pengguna karet alam dari negara-negara maju. Konsep yang ditawarkan adalah pembangunan industri karet alam yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dan dengan tujuan menjamin keberlanjutan penerimaan produsen karet alam (sebagian besar petani) dan jaminan pasokan bagi industri pengguna. Forum IAP kemudian meminta LMC Internasional yang berkedudukan di London

untuk melakukan kajian *Suplai Demand* Karet Alam untuk jangka 30 tahun kedepan. Hasil kajian LMC menyatakan bahwa akan terjadi kekurangan suplai karet alam (*diminishing Natural rubber share*) dalam perdagangan elastomer (karet alam dan sintetis) dunia dalam kurun waktu 30 tahun kedepan, dengan melihat data-data kondisi perkebunan karet di negara-negara produsen pada saat ini.

Pembahasan REP merupakan puncak dan akhir dari acara *World Rubber Summit* tahun 2005 yang berlangsung di Colombo. Pada acara penutupan, Dr Hidde Smit menggaris bawahi perlunya *stakeholder* karet internasional mempertimbangkan *rubber eco project* sebagai solusi bagi keberlanjutan pengembangan industri karet global.

(3) Pertemuan Informal ITRC (Indonesia, Malaysia dan Thailand) : 25 April 2006.

Pertemuan informal anggota ITRC (*International Tripartite Rubber Cooperation*), yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand diprakarsai oleh Indonesia dalam menyikapi makin gencarnya usulan REP yang akan digunakan sebagai salah satu instrument untuk menjaga keseimbangan *supply dan demand* dari karet alam. Dalam diskusi wakil-wakil ke-3 negara tersebut dibahas pengalaman yang terjadi pada komoditi lainnya seperti halnya kakao, kelapa sawit dan kopi dimana isu pelestarian lingkungan dijadikan criteria bagi perdagangan komoditi ternyata telah menjadi bentuk *technical barrier to trade* bagi komoditi yang bersangkutan.

Adalah juga menjadi kecurigaan wakil ke-3 negara bahwa kelompok negara konsumen karet alam mengusulkan *rubber eco project* sebagai bentuk kerjasama produsen-konsumen dalam rangka peningkatan produksi karet alam justru pada saat harga karet alam sedang membaik; sementara pada saat harga karet jatuh pada tingkat yang paling rendah yaitu US \$ 46 cent pada tahun 2001 negara konsumen tidak memprakarsai kerjasama konsumen-produsen untuk mengangkat harga karet alam.

Pertemuan informal wakil-wakil ke-3 negara menghasilkan kesepakatan untuk menolak pembahasan lebih lanjut REP dalam forum IRSG. Wakil Malaysia mengusulkan agar Indonesia, Malaysia dan Thailand sebagai tiga produsen utama karet alam dunia memanfaatkan forum ITRC apabila kelompok industri produk karet dari negara konsumen ingin mengadakan kerjasama sehingga posisi tawar ke-3 negara menjadi lebih kuat.

(4) Sidang ke-42 Assembly of Nations of IRSG: 26-28 April 2006.

Sidang dibuka oleh Chairman 42nd Assembly of Nations IRSG yaitu Datu Dr Michael Dosim Lunjev (sebagai tuan rumah Malaysia mendapat kehormatan menjadi chairman) dan dihadiri oleh wakil-wakil pemerintah dari 17 negara anggota dan beberapa observers.

Lebih lanjut Sekjen IRSG Dr Hidde P Smit, melaporkan secara ringkas hasil pertemuan World Rubber Summit pada tanggal 24-25 April 2006 yang pada intinya diperlukan kerjasama stakeholder karet dunia dalam rangka menciptakan jaminan keberlanjutan industri karet dimasa yang akan datang.

Sesi berikutnya diisi dengan National presentation, yang memberikan kesempatan kepada negara anggota dan observer baik produsen dan konsumen untuk meresentasikan situasi industri karet di negaranya masing-masing. Sedikit catatan dari sesi ini antra lain:

(5) Economic Committee Meeting

Topik yang menjadi pembahasan cukup alot pada sesi ini adalah usulan Chairman dari IAP meeting agar Komite Ekonomi IRSG menerima dan mengadopsi rekomendasi Task Force Rubber Eco Project. Mengawali tanggapan negara-negara anggota lainnya, Indonesia menyampaikan penolakan untuk mengadopsi rekomendasi IAP/Task Force REP dan mendapat dukungan dari Malaysia, Thailand dan India, dengan pertimbangan bahwa REP perlu distudi lebih mendalam manfaatnya bagi produsen karet alam yang sebagian besar adalah petani. Wakil beberapa negara-negara konsumen karet alam seperti EU, France, Germany dan Belgia juga mengusulkan untuk mempelajari lebih mendalam terlebih dahulu dan mengusulkan untuk didiskusikan pada pertemuan khusus bulan Nopember 2005 di London atau dibahas kembali pada *Economic Committee Assembly of Nation IRSG* ke-43 tahun 2007 di Thailand.

Pengamatan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan informasi wakil KBRI London yang juga hadir dalam pertemuan IRSG dalam kapasitasnya sebagai *Chairman Excecutive Committee* hingga tahun 2006, upaya-upaya kalangan industri produk-produk karet (konsumen karet alam) dalam rangka kepastian jaminan suplai karet alam telah lama dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui usulan *Rubber Eco Project* yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat menjadi barrier bagi perdagangan karet dari negara-negara produsen karet. Kekuatan ITRC Indonesia, Malaysia dan Thailand juga menjadi kekhawatiran bagi kalangan industri produk-produk karet di negara konsumen, khususnya dengan semakin

membaihnya harga karet alam. Lebih lanjut disampaikan pula bahwa IRSG merupakan satu-satunya forum kerjasama karet internasional dimana masing-masing kelompok baik produsen maupun konsumen karet alam saling menjaga kepentingan masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut perlu segera dilakukan pertemuan *stakeholder* karet menyikapi keberlanjutan keanggotaan Indonesia di forum IRSG. (tw/hrs).

Workshop Pengembangan Kapasitas Pengelola Pusat Informasi Pertanian, Program Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Inovasi (P4MI), di Hotel Bumi Wiyata Depok 17-19 April 2006



Poor Farmer's Income Improvement through Innovation Project (PFI3P) atau Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Miskin Melalui Inovasi (P4MI), didesain untuk membantu meningkatkan kesejahteraan / pendapatan petani miskin melalui inovasi agribisnis mulai dari tahap produksi sampai dengan pemasaran hasil komoditi pertanian. Targetnya adalah 1000 desa di 5 kabupaten, yaitu Kab. Temanggung 231 desa, Kab. Blora 295 desa, Kab. Donggala 239 desa, Kab. Lombok Timur 106 desa, dan Kab. Ende 156 desa.

Program tersebut dilaksanakan oleh Departemen Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian. Sumber dana berasal dari *soft loan ADB (Asian Development Bank)*, bunga 1-1.5% per tahun, tanpa *commitment fee*, komposisi Loan 79%, GOI 10.1%, Kabupaten 1,4%, Petani 9.5%, Tahun pelaksanaan program dari 2003 s/d 2007. Program ini mempunyai 4 (empat) komponen yaitu

Komponen-1: Pemberdayaan petani untuk mengembangkan inovasi produksi & pasar pertanian/agribisnis (dilaksanakan oleh Kabupaten & melibatkan LSM daerah terkait); Komponen-2: Pengembangan sumber informasi nasional dan lokal, (dilaksanakan oleh **Pusat Data dan Informasi Pertanian**); Komponen-3: Dukungan untuk inovasi teknologi pertanian dan diseminasi, (dilaksanakan oleh Pusat Perpustakaan & Penyebaran Informasi, Pusat-pusat Penelitian serta Balai Penelitian Penyebaran Teknologi Pertanian di Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur); Komponen-4: Manajemen pelaksanaan proyek, (dilaksanakan oleh PCMU di Litbang dan PIU di 5 kabupaten).

Kegiatan "Pembangunan Pusat Informasi Pertanian Operasionalisasi Pusat Informasi Pertanian di Kabupaten" adalah merupakan salah satu sub komponen dari komponen-2 P4MI. Langkah awal dalam proses pembangunan sumber informasi pertanian di tingkat kabupaten adalah penyusunan mekanisme operasionalisasi Unit Pelayanan Informasi Pertanian Kabupaten (UPIPK) di lima kabupaten yaitu Kabupaten Blora, Temanggung, Donggala, Lombok Timur, Ende.

Pada tanggal 17-19 April 2006 bertempat di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Pusdatin telah melaksanakan "**Workshop Pengembangan Kapasitas Pengelola Pusat Informasi Pertanian**". Workshop ini bertujuan untuk "**Merumuskan Mekanisme**

Operasionalisasi Unit Pelayanan Informasi Pertanian Kabupaten (UPIPK) yang meliputi perumusan lokasi dan sumber daya pendukungnya serta mekanisme kerja pengelola unit pelayanan informasi pertanian". Dengan demikian unit pelayanan informasi pertanian yang akan dikembangkan benar-benar dapat membantu petani dalam akses informasi pertanian yang meliputi **informasi pasar komoditi pertanian** serta **informasi teknologi pertanian**. Materi yang disajikan meliputi bagaimana kesiapan dan keterlibatan antara instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka merumuskan mekanisme operasionalisasi pusat informasi pertanian kabupaten.

Peserta workshop seluruhnya berjumlah 70 orang terdiri dari 33 peserta pusat yang berasal dari Pusdatin, Ditjen P2HP, Pustaka, Badan Litbang serta 37 peserta daerah terdiri dari 10 peserta BPTP

(BPTP Prov. Jawa Tengah, BPTP Prov. Sulawesi Tengah, BPTP Prov. NTB, BPTP Prov. NTT), 4 peserta Kab. Blora (Dinas Pertanian, UPTD PIPP), 4 peserta Kab. Temanggung (Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan & KSDA), 6 peserta Kab. Donggala (Dinas Pertanian & Hortikultura, Dinas Perkebunan & Kehutanan), 5 peserta Kab. Lombok Timur (Dinas Pertanian & Peternakan, Dinas Kehutanan & Perkebunan), 8 peserta Kab. Ende yaitu Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan & Perkebunan, Badan Pengelolaan Data Sistem Informasi Telematika dan Sandi (Bappeda). Termasuk juga hadir 2 orang konsultan ICT dan IMS serta 2 orang LSM Pusat.

Workshop ini dibuka oleh Kepala Badan Litbang Departemen Pertanian, Bapak DR. Achmad Suryana, MS. Pada salah satu pointer arahan beliau mengharapkan agar pada workshop ini **dapat menghasilkan rumusan atau kesepakatan yang sifatnya operasional.**

Judul-judul makalah yang disajikan antara lain:

- Kebijakan Pengembangan Sumber Informasi Pertanian Nasional dan lokal kaitannya dengan komponen Pemberdayaan Petani serta komponen Pengembangan dan Diseminasi Inovasi Pertanian

- Peran Pusdatin dan Ditjen P2HP dalam mendukung Pengembangan UPIPK
- Peran Pustaka dalam mendukung Pengembangan UPIPK
- Peran Pengembangan Sumber Informasi Pertanian Nasional dan Lokal dalam mendukung komponen Pemberdayaan Petani P4MI dan Pengembangan & Diseminasi Inovasi Pertanian.
- Peran BPTP dalam mendukung Operasionalisasi UPIPK
- Rancangan UPIPK di 5 kabupaten
- Rekomendasi Model UPIPK yang akan dikembangkan di 5 kabupaten P4MI (kelayakan infrastruktur dan sarananya)
- Dukungan LSM dalam operasionalisasi UPIPK
- Rencana dan Mekanisme Operasionalisasi UPIPK di 5 kabupaten

Pada workshop tersebut para pelaksana kegiatan pengembangan sumber informasi pertanian nasional dan lokal baik di pusat dan daerah dapat saling berkomunikasi dan bersinergi dengan baik dalam rangka menyempurnakan konsep mekanisme operasionalisasi Unit Pelayanan Informasi Pertanian Kabupaten sesuai dengan kondisi sumberdaya yang ada pada masing-masing kabupaten. Keadaan UPIPK di 5 kabupaten disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1: Keadaan Unit Pelayanan Informasi Pertanian Kabupaten (UPIPK) di 5 kabupaten (Blora, Temanggung, Donggala, Lombok Timur, Ende)

URAIAN	KABUPATEN				
	BLORA	TMG	LOTIM	ENDE	DONGG
Lokasi	Dinas Pert. (PI U) dan ada UPTD PIPP	Dinas Pertanian	Sudah ada ruang di BAPPEDA	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Bag. Prog Dipertanak (sementara)
Sarana PC dari PCMU	Telah operasional	Telah operasional	Kurang terpelihara (masih tersimpan)	Dipasang di Dishutbun (UPIPK)	Kurang terpelihara (1 PC utk adm.)
Jaringan	Telkomnet	Belum operasional	Telkomnet	Wireless internet kota	Telkomnet
Petugas UPIPK	Tenaga honorer daerah merangkap staf PI U (2 org operator) + 3 org pengelola Rasta	Tenaga khusus untuk info pasar di Diperta	Tim sedang diusulkan	Belum ada tenaga khusus	Tenaga khusus untuk info pasar

Sumber : Hasil identifikasi tim Pusdatin & PCMU P4MI Badan Litbang, Maret 2006

Hasil Rumusan Workshop Pengembangan Kapasitas Pengelola Pusat Informasi Pertanian :

- Akses informasi pasar dan teknologi pertanian merupakan unsur yang sangat penting untuk kelangsungan usaha tani. Informasi pertanian yang memadai dan tepat waktu dapat digunakan sebagai dasar strategi penguasaan pasar dan dasar perencanaan/pertimbangan untuk pengembangan usaha tani lebih lanjut.
- Pengembangan pusat informasi pertanian di tingkat Kabupaten atau Unit Pelayanan Informasi Pertanian di Kabupaten (UPIPK) merupakan bagian dari kegiatan Komponen Pengembangan Sumber Informasi Pertanian Nasional dan Lokal Proyek Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi (P4MI).
- Manfaat UPIPK adalah:
 1. Mendorong terbentuknya jaringan informasi pertanian di tingkat lokal dan nasional;
 2. Membuka akses petani terhadap informasi pertanian untuk : (a) meningkatkan peluang potensi peningkatan pendapatan dan cara pencapaiannya; (b) meningkatkan kemampuan petani dalam meningkatkan posisi tawarnya, serta (c) meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan diversifikasi usahatani dan merelasikan komoditas yang diusahakannya dengan input yang tersedia, jumlah produksi yang diperlukan, dan kemampuan pasar menyerap output;
 3. Terlaksananya kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi pertanian secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pengembangan pertanian lahan marjinal.
- Secara fungsional, banyak instansi yang terlibat dalam pengembangan UPIPK baik di tingkat pusat yaitu: PUSDATIN, P2HP dan Badan Litbang Pertanian maupun di daerah yaitu: Dinas Pertanian dan Pemda setempat. Sinkronisasi dan sinergisme antar pelaksana keproyekan (PCMU, PIU, Konsultan, dan LSM dengan institusi terkait lainnya di pusat dan daerah) dan antar komponen (pemberdayaan petani, pengembangan sumber informasi pertanian, dan komponen pengembangan dan diseminasi inovasi pertanian) sangat diperlukan dalam operasionalisasi UPIPK.
- Di tingkat pusat, PUSDATIN, P2HP, dan Badan Litbang Pertanian (PUSTAKA dan Sekretariat Badan) berperan sebagai sumber informasi pasar dan teknologi pertanian nasional yang dapat diakses melalui internet secara online maupun sebagai pendukung penyediaan informasi dalam media konvensional maupun elektronik bagi UPIPK.
- Di tingkat regional, BPTP akan terus memfasilitasi kegiatan diseminasi inovasi pertanian spesifik lokasi dalam berbagai media (konvensional maupun modern) dan mengembangkan kapasitas institusi lokal dalam mendukung operasionalisasi UPIPK.
- Informasi yang dikembangkan di tingkat lokal harus bersifat sederhana, menggunakan media yang murah dalam bentuk konvensional maupun tradisional yang populer di tingkat petani, dan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia. Di tingkat daerah, pengguna antara (intermediate user) yaitu LSM Lokal (fasilitator desa) dan penyuluh pertanian diharapkan dapat bersinergi dengan tokoh masyarakat untuk mendukung operasionalisasi diseminasi informasi pertanian sampai di tingkat petani. Seluruh media potensial yang mampu menjangkau pengguna (siaran radio, telepon seluler, papan pengumuman desa, dan komunikasi interpersonal) sampai di tingkat desa perlu dioptimalkan dan dikombinasikan untuk mempercepat diseminasi informasi pertanian.
- Pada akhirnya, sinergi tupoksi dan komitmen di antara pelaku operasionalisasi UPIPK, khususnya di daerah perlu diintensifkan untuk menjamin keberlanjutan UPIPK.
- Hasil komitmen bersama dalam workshop meliputi:
 1. Kesepakatan nama UPIPK
 2. Struktur organisasi UPIPK
 3. Mekanisme operasionalisasi UPIPK
 4. Aktivitas operasionalisasi UPIPK (termasuk alternatif mekanisme diseminasi informasi sampai di tingkat pengguna)
 5. Peran institusi terkait di tingkat regional (BPTP dan Dinas Pertanian Provinsi) dan di tingkat Kabupaten termasuk sektor Swasta dan LSM
 6. Keberlanjutan operasionalisasi UPIPK (surat Edaran) bahwa anggaran operasionalisasi UPIPK harus didukung dana APBD. (ssr)

Rencana Survei Stok dan Konsumsi Tahun 2006

Informasi mengenai stok beras ini sangat penting untuk mengetahui situasi katahnan pangan, baik di tingkat rumah tangga, kabupaten, wilayah maupun nasional. Informasi stok beras pemerintah relatif lebih mudah diperoleh karena penyelenggaranya instansi pemerintah (pada saat ini Bulog). Namun demikian, informasi mengenai stok gabah/beras di masyarakat lebih sulit diperoleh dan data stok ini tidak tersedia secara rutin. Di sisi lain data stok ini sangat dibutuhkan dalam penentuan kebijakan sektor pertanian karena menyangkut ketersediaan pangan di suatu wilayah.

Konsumsi beras per kapita berdasarkan Susenas 2005 adalah sebesar 1.844 kg/kapita/minggu atau 0.2634 kg/kapita/hari atau 95.888 kg/kapita/tahun. Nilai tersebut hanya konsumsi rumah tangga, belum termasuk konsumsi di luar rumah tangga. Konsumsi di luar rumah tangga berupa makanan yang dibeli dari luar dan tidak diolah di rumah. Perhitungan kebutuhan beras membutuhkan data konsumsi langsung yaitu konsumsi di rumah tangga dan konsumsi di luar rumah tangga. Untuk ketepatan perhitungan kebutuhan beras perlu dilakukan survei konsumsi beras rumah tangga maupun konsumsi makanan jadi berbahan baku beras di luar rumah tangga. Jika angka konsumsi makanan yang dibeli di luar rumah tangga dapat diduga besarnya, maka angka tersebut dapat menjadi perbandingan dengan konsumsi rumah tangga atau berapa persen konsumsi

makanan jadi di luar rumah tangga dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga. Hasil survei nanti diharapkan memperoleh angka konsumsi langsung yaitu konsumsi rumah tangga ditambah dengan konsumsi luar rumah tangga.

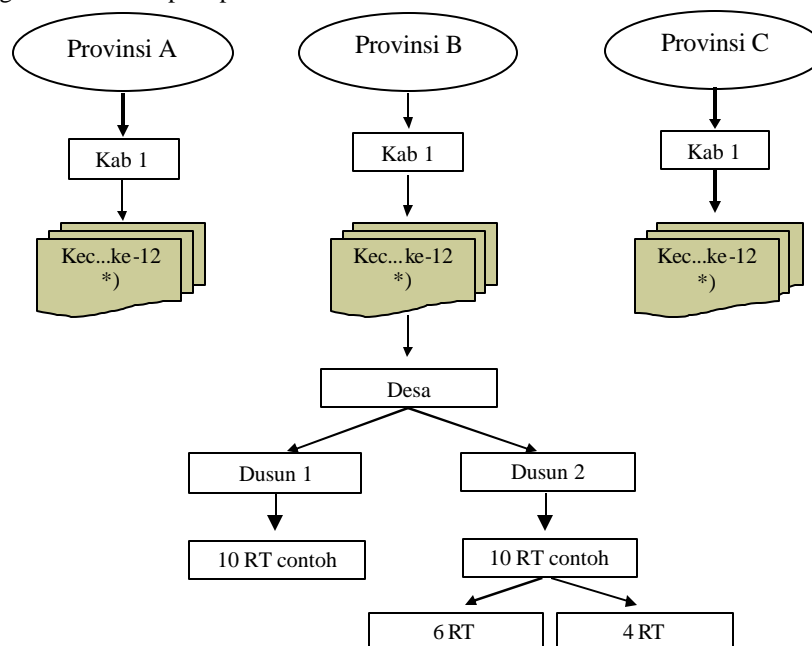
Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan survei sehingga diperoleh data stok dan konsumsi gabah/beras di rumah tangga untuk suatu wilayah, dan selanjutnya dibuat model perhitungan total stok dan konsumsi gabah/beras di suatu wilayah.

Survei konsumsi akan dilakukan bersama-sama dengan survei stok. Seperti halnya pada survei stok, survei konsumsi juga dilakukan terhadap rumah tangga petani produsen, dan rumah tangga konsumen. Rumah tangga petani produsen yang terpilih sebagai sampel survei stok maka terpilih juga survei konsumsi.

Survei ini direncanakan dilakukan pada 3 provinsi, yaitu :

1. Provinsi Sumatera Barat : Kabupaten Solok.
2. Provinsi Kalimantan Selatan : Kabupaten Banjar.
3. Provinsi Jawa Tengah : Kabupaten Demak

Pada setiap provinsi tersebut akan dipilih 1 kabupaten contoh. Selanjutnya setiap kabupaten akan dipilih 12 kecamatan (3 kecamatan perkotaan dan 9 kecamatan pedesaan) secara acak. Untuk setiap kecamatan akan dipilih satu desa secara acak, dan setiap desa dipilih 2 RW/dusun secara acak pula. Pada dusun yang terpilih dilakukan listing yaitu pendaftaran rumah tangga, selanjutnya dipilih rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen sampel.



Keterangan :

*) Alokasi kecamatan : 3 kecamatan kota & 9 kecamatan pedesaan

Terdapat beberapa kerangka sampel (*frame*) yang digunakan pada survei ini, yaitu:

1. Kerangka sampel untuk pemilihan kabupaten, yang merupakan daftar nama kabupaten di propinsi sampel.
2. Kerangka sampel untuk pemilihan kecamatan, yaitu daftar kecamatan dalam kabupaten terpilih.
3. Kerangka sampel untuk pemilihan desa, yaitu daftar desa dalam kecamatan terpilih.
4. Kerangka sampel untuk pemilihan dusun, yaitu daftar dusun dalam desa terpilih.
5. Kerangka sampel rumahtangga petani produsen dan konsumen, yaitu daftar listing rumah tangga petani produsen dan rumah tangga konsumen.

Jumlah sampel rumah tangga petani produsen dan konsumen sekitar 720 sampel. Banyaknya rumah tangga yang terpilih untuk dusun adalah 10 rumah tangga, terdiri dari 6 rumah tangga petani produsen dan 4 rumah tangga konsumen.

Tahapan penarikan sampel rumah tangga petani dan konsumen yang diterapkan meliputi :

- a. Tahap pertama, memilih 1 kabupaten untuk setiap provinsi sampel.
- b. Tahap kedua, dari kabupaten terpilih, memilih 12 kecamatan sampel secara *simple random sampling*.
- c. Tahap ketiga, memilih 1 desa di kecamatan terpilih, kemudian memilih secara acak 2 dusun/RW pada masing-masing desa terpilih.
- d. Tahap keempat, dari hasil listing rumah tangga pada setiap dusun/RW sampel dipilih sampel rumahtangga petani produsen padi (6 RTP) dan rumah tangga konsumen (4 RTP), jadi dalam 1 dusun/RW diambil sampel sebanyak 10 RTP.

Analisis yang digunakan secara umum adalah membuat analisis deskripsi stok dan konsumsi (rata-rata, median, rasio stok terhadap produksi dan lain-lain), membangun model pendugaan (menurut survei dan model) total stok baik stok pada rumah tangga petani maupun stok rumah tangga konsumen, menghitung rata-rata konsumsi beras per kapita dan membandingkan dengan hasil Susenas 2005 dan menghitung rata-rata konsumsi makanan jajanan berbahan baku beras. (chf)

Audit Teknologi Informasi Pertanian Departemen Pertanian

Pendahuluan

Pada saat ini Teknologi Informasi sudah dipakai sebagai alat untuk menunjang tugas-tugas dari Departemen Pertanian. *Good Corporate*

Governance (GCG, Tatakelola yang Baik) sebagai salah satu obsesi badan-badan pemerintahan saat ini membutuhkan elemen pendukung yang cukup menentukan yakni Tatakelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) yang berkedudukan dan berfungsi strategis guna memenuhi salah satu prinsip dasarnya GCG, yaitu transparansi. *IT Governance* memberikan struktur yang menghubungkan *IT Process*, *IT Resources*, dan *Information* ke strategi dan objektif organisasi. *IT Governance* mengintegrasikan dan menginstitutionalkan langkah optimal *planning and organising, acquiring and implementing, delivering and support*, dan monitoring kinerja teknologi informasi. *IT Governance* merupakan bagian integral dari sukses GCG dengan menjamin efisiensi dan efektivitas *improvement* yang dapat diukur dari proses-proses di organisasi. *IT Governance* memungkinkan organisasi mendapatkan keuntungan penuh atas eksistensi pengelolaan informasi yang dimilikinya. Ketika teknologi informasi diimplementasikan, maka diperlukan sebuah prosedur peninjau secara berkala atas teknologi informasi tersebut untuk menjamin pencapaian *IT Governance*. Dalam konteks ini maka dilaksanakan observasi yakni menginventarisir fakta-fakta atas teknologi informasi, dan dari fakta-fakta tersebut disusun rekomendasi-rekomendasi untuk mempertahankan capaian tersebut. Untuk mendapatkan fakta-fakta dan rekomendasi tersebut dilakukanlah proses kontrol Teknologi Informasi. Proses-proses ini biasa disebut dengan Audit Teknologi Informasi.

Tujuan: untuk memahami kondisi kekinian secara *IT Governance* secara makro dari Pusdatin.

Sasaran: ditujukan untuk memetakan kemampuan manajerial dan kompetensi Pusdatin dalam mengelola TI Departemen Pertanian, mengingat Pusdatin mempunyai peran sentral dalam tatakelola TI di Deptan.

Tahapan Audit

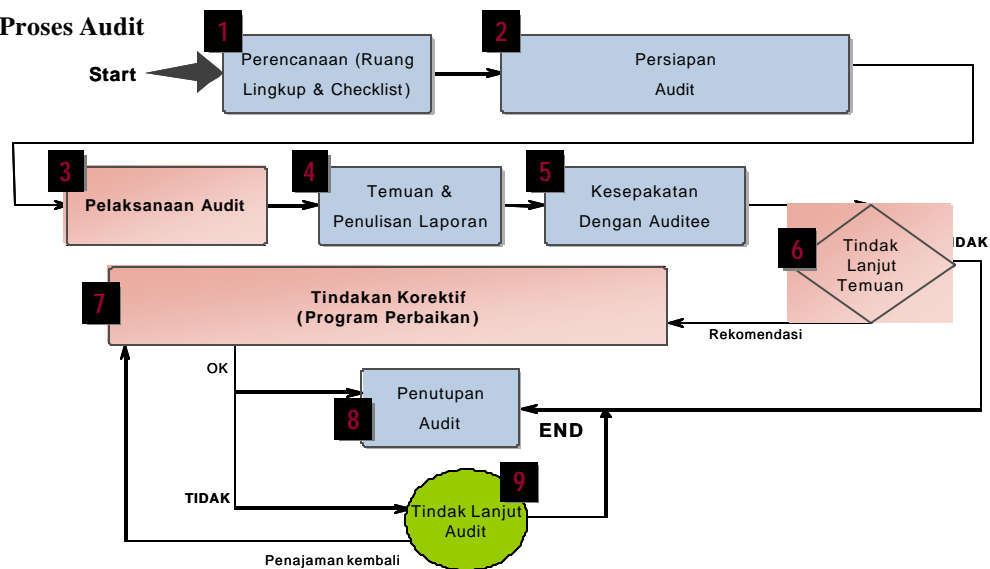
Metodologi yang digunakan pada kegiatan ini mengacu pada Metodologi COBIT, dimana tahapan kegiatannya terdiri dari: (1) penentuan subjek, yaitu menentukan apa yang akan diobservasi; (2) penentuan kegiatan maksudnya, menentukan tujuan dari kegiatan. Misalnya "menentukan apakah *source code* dapat diubah-ubah dalam data center yang dianggap *secure*", (3) penentuan ruang lingkup, artinya: menentukan sistem, fungsi dan bagian dari organisasi yang secara spesifik akan diobservasi. Misalnya hanya melihat dari *source code* yang diaplikasi internet banking saja, (4) perencanaan awal, maksudnya adalah: mengidentifikasi sumberdaya dan SDM yang dibutuhkan,

menentukan dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk mendukung observasi, dan menentukan lokasi kegiatan observasi; (5) prosedur observasi dan tahapan pengumpulan data, dimaksudkan untuk menentukan cara bagaimana melakukan observasi untuk memeriksa dan menguji kontrol, serta menentukan siapa yang akan diwawancarai; (6) evaluasi hasil pengujian dan pemeriksaan (spesifik pada tiap organisasi); (7) prosedur komunikasi dengan pihak manajemen (spesifik pada tiap organisasi); (8) persiapan laporan yaitu menentukan bagaimana cara *review* hasil observasi, dan evaluasi keabsahan dari dokumen-

dokumen, prosedur, dan kebijakan dari organisasi yang diobservasi.

Berdasarkan hasil audit ditemukan beberapa hal yaitu; (1) manajemen inisiasi dan kontrol perubahan sistem informasi serta evaluasi kinerja sistem informasi belum berjalan optimal; (2) fungsi organisasi dan Kemampuan SDM dalam mengelola TI belum sepenuhnya optimal; (3) belum terdefiniskannya standar operasional prosedur secara komprehensif; (4) manajemen aset infrastruktur belum terkelola secara optimal.

Gambar (1) Proses Audit



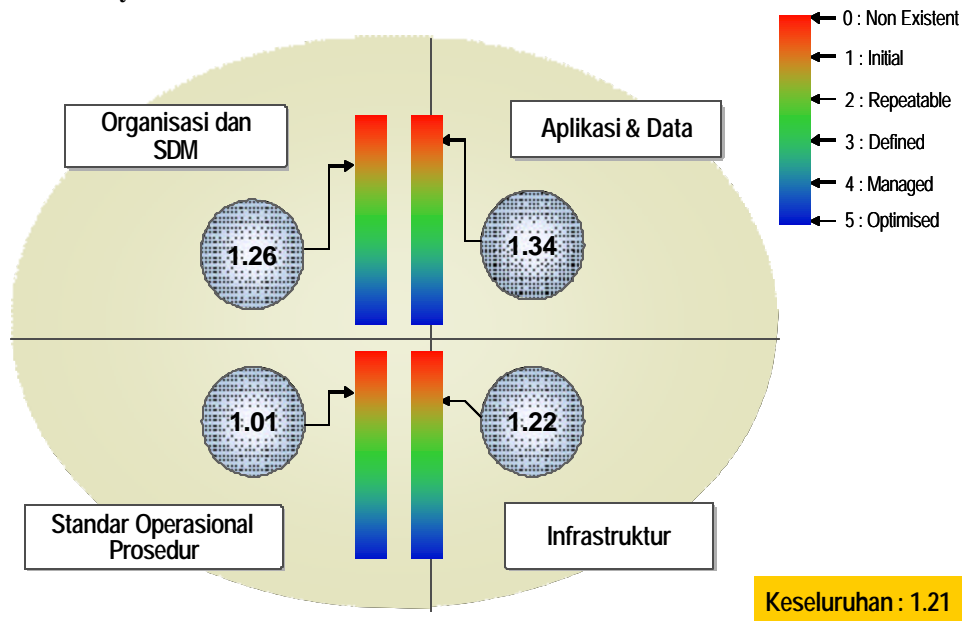
Hasil Audit dan Rekomendasi

Hasil dari audit yang dilakukan dengan menggunakan metodologi COBIT (*Control Objective for Information and Related Technology*), secara keseluruhan tingkat kematangan pengelolaan TI di Deptan adalah

kurang dari indeks 2 dari 5 skala COBIT, yang berarti, pengelolaan TI secara umum mendekati sifat *repetitive* dan reaktif dan belum terlihat suatu perencanaan dan pemakaian secara optimal.

Bidang Audit	Hasil Audit
Sistem Operasional Prosedur	Belum terdefiniskan Standar Operasional Prosedur secara komprehensif
Organisasi dan SDM	Fungsi organisasi dan kemampuan SDM dalam mengelola IT belum sepenuhnya optimal
Aplikasi	Manajemen inisiasi dan kontrol perubahan sistem informasi serta evaluasi kinerjanya belum berjalan optimal
Infrastruktur	Manajemen aset infrastruktur belum terkelola secara optimal

Penilaian - Maturity



Rekomendasi, Kegiatan usulan dan skala prioritasnya, untuk tindak lanjut hasil audit tersebut adalah:

No.	Rekomendasi	Kegiatan Usulan	Skala Prioritas
1	Mengkaji ulang asas legal formal kebijakan TI Governance	Membuat legalitas manajerial TI Deptan, mengacu ke rencana induk teknologi informasi (ITMP)	1
2	Memperbaiki tata kelola TI Deptan: Aplikasi, Infrastruktur, Organisasi	Menyusun ITMP, sebagai rencana induk jangka menengah	1
3	Membina SDM TI melalui program peningkatan kompetensi	Capacity building mengacu ke ITMP	2
4	Menyusun dan menegakkan pelaksanaan standar operasinal prosedur pada setiap proses TI	Pembentukan penanggung jawab penyusunan SOP	2
5	Meningkatkan fungsi kontrol dan pengawasan	Pembentukan penanggung jawab control dan pengawasan TI	2

Penutup

Demikian laporan audit teknologi informasi di Deptan, dengan konsentrasi di Pusdatin. Laporan ini dapat menjadi bahan bagi Departemen Pertanian untuk menerapkan *best practices* dalam manajemen, pengelolaan, praktek teknologi dan sistem informasi sehingga akhirnya meningkatkan tingkat kematangan (*maturity level*) teknologi dan system informasi di masa mendatang (lh).

Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Peternakan Tingkat Nasional 2006

Peternakan mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Peternakan juga merupakan sumber protein hewani bagi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan peternakan perlu terus ditingkatkan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan peternakan dikatakan berhasil baik apabila peternakan dapat memberi manfaat yang lebih baik yakni memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan protein hewani, di samping itu peternakan diharapkan dapat memberi

pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat peternak dan juga dapat meningkatkan devisa negara. Hal itu dapat dicapai apabila perencanaan, kebijaksanaan dan keputusan yang diambil dalam pembangunan peternakan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Perencanaan dan pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang demikian hanya dapat dilakukan apabila data yang dibutuhkan untuk itu tersedia dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Perencanaan dan pengambilan keputusan dengan menggunakan data yang salah akan menjadikan perencanaan dan kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.

Untuk menghindari hal-hal seperti itu maka data peternakan yang disajikan seyogianya sudah dicek kebenarannya sehingga data peternakan yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan dengan baik. Adanya data peternakan yang tepat, cepat, dan akurat akan menghasilkan perencanaan dan kebijaksanaan yang baik dan tepat. Sehubungan dengan hal itu maka, penyediaan data peternakan dirasakan sangat diperlukan dan sudah menjadi kebutuhan pokok dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan dalam bidang peternakan.

Sesuai dengan keputusan Dirjen Peternakan dalam surat keputusannya No. 04/HM030/Kpts/DJP/0199 tentang Pedoman Pengumpulan, Penyajian dan Analisa Data Peternakan maka untuk ketersediaan data peternakan dilakukanlah, yakni mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data peternakan.

Pengumpulan data peternakan, dilakukan dengan cara pelaporan dari sumber data ke Dinas Peternakan Kabupaten dan oleh Dinas Peternakan Kabupaten dilaporkan di Dinas Peternakan Propinsi dan oleh Dinas Peternakan Propinsi dilaporkan ke Ditjen Peternakan Pusat. Sesuai dengan lampiran SK Dirjen Peternakan tersebut di atas, sebelum data diolah dan disajikan maka data-data yang diperoleh terlebih dahulu divalidasi dan diverifikasi untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk selanjutnya ditetapkan menjadi angka tetap. Sehubungan dengan hal itu maka pada tanggal 27-29 April 2006 Ditjen Peternakan mengadakan pertemuan untuk validasi dan verifikasi secara nasional yang dihadiri oleh para petugas pengelola data peternakan masing-masing Dinas Propinsi yang menangani data peternakan. Validasi dan verifikasi ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran dan keakuratan data peternakan untuk tahun 2005. Pada tahap tersebut dilakukan pemeriksaan data data yang telah dilaporkan oleh daerah ke Ditjen Peternakan. Dalam pertemuan tersebut masing-masing propinsi diberi waktu untuk memaparkan

data dan statistik peternakan. Data yang dipaparkan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga diketahui data yang sebenarnya dan dapat ditetapkan menjadi angka tetap 2005. Dari paparan masing-masing daerah, juga diperoleh permasalahan dan kendala dalam perstatistik peternakan di masing-masing propinsi, sehingga dapat dicari solusi dan pemecahannya. Dalam acara pertemuan verifikasi dan validasi peternakan tersebut juga diberikan: Paparan pengembangan metodologi perstatistik yang dibawakan oleh pusdatin. Paparan ini disampaikan oleh Ir. Budi Waryanto MSi Kasubbid Data Peternakan Pusat Data dan Informasi Pertanian. Dalam paparannya ditekankan bahwa untuk mewujudkan data yang berkualitas perlu manajemen data dan informasi melalui penerapan metodologi perstatistik yang tepat. Selain itu juga dipaparkan pelaksanaan SPN '06 (Survei Rumah Tangga Peternakan Nasional '06) oleh Badan Pusat Statistik.

Dengan adanya verifikasi dan validasi data peternakan tersebut, diharapkan ketersediaan data peternakan dapat meningkat lebih baik. (rmg)

Kunjungan Petugas Pengelola Data dan Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Papua di Pusdatin, 2006

Berawal dari kesadaran akan keterbatasan SDM pengelola data yang cakap, maka Pejabat Dinas Provinsi Perkebunan Papua bertekad untuk mulai membenahi data perkebunan kearah yang lebih baik. Melalui peningkatan kualitas SDM yang handal di bidang pengelolaan data, diharapkan mampu menyajikan data yang akurat, tepat waktu, obyektif dan konsisten. Penataan data dimulai dari membina SDM-nya khususnya petugas pengelola data dan statistik. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya kerjasama antara Pusat Data dan Informasi Pertanian dengan Dinas Perkebunan Provinsi Papua yang menitikberatkan pada pengelolaan data dan statistik secara baik dan benar. Bentuk kerjasama kemudian ditindak-lanjuti dengan mengirimkan petugas statistik secara kontinu sejak tahun 2003 hingga sekarang. Pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 18-19 April 2006 Petugas pengelola data yang dikirim ke Pusdatin bukan hanya dari Dinas Perkebunan tingkat provinsi, melainkan juga petugas pengelola data dan statistik tingkat kabupaten pun turut dilibatkan meskipun belum semua kabupaten berpartisipasi. Petugas-petugas yang dikirim adalah:



- (a) Peter dari Dinas Provinsi Papua.
- (b) Amirudin, dari Dinas Perkebunan Kabupaten Yapen Waropen.
- (c) Yan Kaviar, dari Dinas Perkebunan Kabupaten Biak Numpar.
- (d) Arwin Purba, dari Pranata Kehutanan Kabupaten Kerom

Petugas ke-lima akan dikirim kemudian

Tentu saja hal ini terkait dengan seberapa besar dana yang dialokasikan untuk kepentingan tersebut, sehingga petugas kabupaten yang dikirimkan ke Pusdatin pun baru empat orang dari 20 kabupaten yang ada di Papua, dan satu orang dari petugas provinsi. Setiap kabupaten diwakili oleh satu orang petugas pengelola statistik.

Kunjungan petugas statistik dari Papua bukan hanya sekedar jalan-jalan, menikmati hiruk-pikuk dan gemerlap kota metropolitan sebagai ibu kota negara tercinta, tetapi ingin mempelajari dan menggali lebih dalam bagaimana mengelola data

secara benar. Lebih jauh, mereka ingin mengetahui cara mengolah data, menyajikan data dengan cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan pembangunan khususnya subsektor perkebunan. Selain itu, mereka juga ingin agar sumberdaya alam dan potensi wilayah mereka dapat didata dengan tepat, baik produksi, luas area, produktivitas dan lain sebagainya.

Mengingat kondisi wilayah Papua yang cukup luas dan sulit dijangkau serta sarana prasarana yang terbatas, seperti alat transportasi yang mahal,

sehingga diperlukan kepiawaian dalam menaksir luasan perkebunan dengan cepat dan tepat. Sehubungan dengan hal tersebut materi tentang metode penaksiran luas sangat diperlukan oleh petugas perstatistikan di Papua, sehingga para instruktur dari Pusdatin pun lebih menekankan pada metode estimasi yang mudah dan dapat diaplikasikan di lapangan. Materi yang diberikan pada pelatihan antara lain: (1) metode pengumpulan data luas panen dan produksi, (2) metode estimasi luas area dan produksi (3) formulir elektronik (*e-form*) mulai dari cara menginstal, entri data, *up-load* data dan laporan/rekap hasil entri.

Awalnya mereka agak alergi dengan statistik, melihat simbol dan angka-angka yang terkesan rumit dan jelimet, tetapi setelah ditekuni ternyata menarik juga, kilah mereka, benarlah apa kata pepatah "tak kenal maka tak sayang". (lh).

**Tiga hal yang paling diperlukan untuk meraih keberhasilan :
pertama, kerja keras; kedua, ketekunan; dan ketiga, akal sehat.
Segala sesuatu akan berhasil kepada orang yang terus bekerja sambil
mencari kesempatan.
(Thomas A. Edison)**